

KEBIJAKAN DAN PERMASALAHAN AKSES PENDIDIKAN DASAR

Rizki Ananda¹, Rindani Nur Adma², Putri Anggraini³, Putri Arifiana⁴, Nursaiyana⁵

¹PGSD, FKIP, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

^{2,3,4,5}Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

¹rizkiananda.mhs.upi@gmail.com, ²rindaninuradma@gmail.com

ABSTRACT

Access to basic education is a cornerstone of human resource development and plays a vital role in a nation's progress. To ensure every child no matter their social, economic, or geographic background has a fair chance at receiving quality education, inclusive and equitable education policies are essential. However, in many countries, including Indonesia, several obstacles still limit access to basic education. These include uneven distribution of educational infrastructure, a shortage of qualified teachers, and economic and cultural barriers that hinder children's participation in school. This article explores the policies that have been introduced to improve access to basic education and examines the challenges that remain in achieving fair and equal education for all children. By understanding both the current policies and the ongoing issues, we can work towards finding effective solutions to expand educational access across different regions.

Keywords: basic education access, education policy, inequality, educational infrastructure, teaching staff, child participation, educational solution

ABSTRAK

Akses terhadap pendidikan dasar merupakan pondasi penting dalam pengembangan sumber daya manusia dan kemajuan suatu bangsa. Untuk memastikan setiap anak tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun geografis memiliki kesempatan yang setara dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas, dibutuhkan kebijakan pendidikan yang inklusif dan merata. Namun, masih banyak tantangan yang menghambat akses pendidikan dasar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tantangan tersebut mencakup ketimpangan infrastruktur pendidikan, kekurangan tenaga pengajar yang berkualitas, serta faktor ekonomi dan budaya yang memengaruhi partisipasi anak dalam pendidikan. Artikel ini membahas berbagai kebijakan yang telah diterapkan untuk memperluas akses pendidikan dasar, serta mengulas hambatan yang masih ada dalam mewujudkan pendidikan yang adil dan setara bagi semua anak. Dengan memahami kebijakan dan tantangan yang ada, diharapkan solusi yang lebih efektif dapat ditemukan untuk meningkatkan akses pendidikan dasar di berbagai wilayah.

Kata Kunci: akses pendidikan dasar, kebijakan pendidikan, ketimpangan, infrastruktur pendidikan, tenaga pengajar, partisipasi anak, solusi pendidikan

A. Pendahuluan

Pendidikan dasar adalah pijakan utama dalam membentuk individu dan membangun masyarakat yang maju. Di tengah arus globalisasi yang terus berkembang, akses terhadap pendidikan yang berkualitas menjadi semakin penting bukan hanya untuk meningkatkan kapasitas pribadi setiap anak, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan perubahan sosial yang positif. Pendidikan dasar yang baik membantu anak-anak menguasai keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung kemampuan esensial yang akan mereka butuhkan sepanjang hidup.

Namun, meskipun banyak negara, termasuk Indonesia, telah menyadari pentingnya pendidikan dasar, kenyataannya masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Berbagai kebijakan memang telah diterapkan, seperti program Wajib Belajar 12 Tahun dan pembangunan sekolah di daerah terpencil. Tapi, masih banyak anak di Indonesia yang belum bisa menikmati pendidikan yang layak.

Beberapa kendala utama dalam memperluas akses pendidikan dasar antara lain adalah ketimpangan infrastruktur pendidikan banyak daerah, khususnya di wilayah pedesaan dan terpencil, masih kekurangan fasilitas sekolah yang

memadai. Selain itu, jumlah guru yang berkualitas dan terlatih juga belum mencukupi. Tak kalah penting, faktor ekonomi dan budaya, seperti kemiskinan serta anggapan bahwa pendidikan bukan hal yang utama, ikut mempengaruhi rendahnya partisipasi anak-anak di dunia pendidikan.

Melalui artikel ini, penulis ingin menggali lebih dalam kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan untuk memperluas akses pendidikan dasar di Indonesia, sekaligus menyoroti tantangan-tantangan yang masih menghambat. Dengan memahami akar permasalahan, diharapkan kita dapat menemukan langkah-langkah konkret dan efektif agar setiap anak, di mana pun mereka berada, memiliki kesempatan yang adil untuk memperoleh pendidikan dasar yang berkualitas.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis berbagai kebijakan dan permasalahan yang berkaitan dengan akses pendidikan dasar di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memberikan ruang bagi peneliti untuk menggali lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi akses pendidikan, sekaligus memahami sudut pandang dari berbagai pihak yang terlibat langsung, seperti pemerintah, pendidik, orang tua, dan siswa.

1. Studi Literatur

Langkah awal dalam proses penelitian ini adalah melakukan studi literatur untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang relevan termasuk jurnal akademik, laporan resmi pemerintah, serta dokumen dari organisasi non-pemerintah. Tujuan dari studi ini adalah untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kebijakan pendidikan yang telah diterapkan, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang masih menghambat pemerataan akses pendidikan dasar.

2. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil studi literatur kemudian dianalisis secara tematik. Peneliti mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema utama yang muncul dari data, seperti ketimpangan dalam infrastruktur pendidikan, kualitas tenaga pengajar, serta pengaruh faktor ekonomi dan budaya terhadap partisipasi anak dalam pendidikan dasar.

3. Triangulasi

Untuk meningkatkan keakuratan hasil, teknik triangulasi digunakan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber. Langkah ini membantu memastikan bahwa data yang diperoleh bersifat valid dan dapat diandalkan, serta memperkaya pemahaman tentang dinamika kebijakan dan

tantangan yang dihadapi di lapangan.

Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai hambatan yang masih ada dalam memperluas akses pendidikan dasar di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang bernilai bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kebijakan Pendidikan yang Diterapkan

Kebijakan pendidikan di Indonesia telah melalui berbagai perubahan dan penyesuaian dengan tujuan utama: memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan dasar. Berikut adalah sejumlah kebijakan penting yang telah diterapkan dan dampaknya di lapangan.

a. Program Wajib Belajar

Program Wajib Belajar dimulai dengan 9 tahun dan kini diperluas menjadi 12 tahun. Kebijakan ini menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah secara gratis.

- **Tujuan dan Implementasi:**

Tujuan utama program ini

adalah meningkatkan angka partisipasi sekolah dan menekan angka putus sekolah. Pemerintah daerah didorong untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai dan mengalokasikan anggaran guna mendukung keberhasilan program ini. Meski sudah menunjukkan hasil positif, masih ada tantangan, khususnya di wilayah terpencil yang kekurangan infrastruktur dan sumber daya manusia.

- **Dampak Positif:**

Secara nasional, program ini berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah. Data dari Kementerian Pendidikan menunjukkan adanya peningkatan pada angka partisipasi kasar (APK) pendidikan dasar, yang artinya semakin banyak anak yang terdaftar di sekolah.

- **Tantangan:**

Sayangnya, belum semua daerah bisa merasakan manfaat program ini secara merata. Anak-anak dari keluarga kurang mampu atau yang tinggal di wilayah terpencil masih menghadapi banyak kendala, termasuk keterbatasan transportasi dan beban ekonomi.

b. Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Program BOS dirancang untuk meringankan beban biaya pendidikan dengan memberikan dana langsung ke sekolah. Dana ini digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pembelian alat tulis hingga perbaikan sarana belajar.

- **Tujuan dan Manfaat:**

BOS bertujuan untuk mengurangi beban biaya pendidikan bagi orang tua, sekaligus membantu sekolah meningkatkan kualitas layanan belajar-mengajar.

- **Dampak Positif:**

Program ini cukup berhasil, terutama untuk sekolah-sekolah di daerah yang selama ini kekurangan dana. Kini, banyak sekolah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik.

- **Tantangan:**

Namun, pengelolaan dana BOS tidak selalu berjalan mulus. Masih ada sekolah yang kesulitan mengatur penggunaan dana secara efisien, dan tantangan distribusi dana masih terjadi—khususnya di daerah yang aksesnya sulit.

c. Pembangunan Infrastruktur Pendidikan.

Pemerintah juga fokus pada pembangunan dan

perbaikan infrastruktur pendidikan, termasuk mendirikan sekolah baru di wilayah yang belum terjangkau, serta memperbaiki fasilitas yang sudah ada.

- **Tujuan dan Implementasi:**

Kebijakan ini ditujukan untuk menjamin semua anak bisa belajar di lingkungan yang aman dan nyaman. Pemerintah aktif membangun sekolah dan menyediakan fasilitas pendukung, seperti air bersih dan sanitasi.

- **Dampak Positif:**

Di banyak daerah terpencil, kebijakan ini membawa angin segar. Sekolah-sekolah baru memungkinkan anak-anak yang sebelumnya harus berjalan jauh kini bisa belajar lebih dekat dengan rumah mereka.

- **Tantangan:**

Sayangnya, tidak semua pembangunan disertai perawatan yang memadai. Banyak sekolah baru yang cepat mengalami kerusakan karena minimnya dana pemeliharaan. Di sisi lain, masih ada wilayah yang belum tersentuh pembangunan, menyebabkan kesenjangan akses tetap terjadi.

d. Kebijakan Inklusi Pendidikan.

Kebijakan ini bertujuan agar semua anak termasuk yang memiliki kebutuhan khusus mendapat kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah formal.

- **Tujuan dan Implementasi:**

Melalui pedoman nasional, pemerintah mendorong sekolah-sekolah untuk menjadi lebih inklusif, baik dari segi fasilitas maupun pendekatan pengajarannya.

- **Dampak Positif:**

Kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus mulai tumbuh. Beberapa sekolah telah mengadopsi pendekatan inklusif dan menyediakan fasilitas pendukung seperti ramp, ruang belajar khusus, dan guru pendamping.

- **Tantangan:**

Namun, tantangan masih besar. Banyak sekolah belum siap baik secara fisik maupun SDM. Guru pun masih memerlukan pelatihan tambahan, dan dukungan pemerintah masih terbatas dari sisi pendanaan maupun sumber daya.

e. Pengembangan Kurikulum.

Revisi kurikulum dilakukan untuk menyesuaikan isi pembelajaran dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik saat ini.

- **Tujuan dan Implementasi:**

Pemerintah berupaya agar kurikulum tidak hanya berisi pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi.

- **Dampak Positif:**

Pendekatan berbasis kompetensi dan penguatan karakter membawa perubahan positif. Siswa tidak hanya diajarkan teori, tetapi juga keterampilan yang relevan dengan kehidupan nyata.

- **Tantangan:**

Namun, penerapan kurikulum baru tidak selalu berjalan mulus. Banyak guru yang belum menerima pelatihan memadai, dan ada kesenjangan besar antara desain kurikulum dan pelaksanaan di kelas, di mana metode tradisional masih dominan.

Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan upaya nyata pemerintah dalam memperbaiki sistem pendidikan dasar. Namun, agar dampaknya bisa dirasakan secara merata, tantangan-tantangan dalam implementasi tetap

perlu mendapat perhatian serius mulai dari aspek anggaran, sumber daya manusia, hingga kesenjangan antarwilayah.

2. Permasalahan Akses Pendidikan Dasar.

Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan untuk memperluas akses pendidikan dasar, kenyataannya masih banyak anak-anak Indonesia yang belum bisa menikmati pendidikan yang layak. Berbagai kendala yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa akses pendidikan belum sepenuhnya merata. Berikut beberapa masalah utama yang masih dihadapi:

a. Ketimpangan Infrastruktur Pendidikan.

Salah satu tantangan paling nyata adalah ketidakmerataan fasilitas pendidikan antarwilayah.

- **Apa yang Terjadi?**

Sekolah-sekolah di kota besar biasanya memiliki fasilitas lengkap: ruang kelas nyaman, laboratorium, akses internet, bahkan AC. Tapi di sisi lain, banyak sekolah di pelosok desa atau daerah terpencil yang kekurangan ruang kelas, toilet bersih, dan air minum layak. Beberapa bahkan masih belajar di bangunan semi permanen.

- **Mengapa Ini Penting?**

Kondisi sekolah yang buruk bisa memengaruhi semangat belajar siswa. Ruang belajar yang panas dan sesak, atau bahkan bocor saat hujan, tentu bukan tempat yang ideal untuk belajar. Hal ini bisa membuat siswa tidak nyaman, enggan datang ke sekolah, dan pada akhirnya berpotensi putus sekolah.

b. Kualitas Guru yang Belum Merata.

Guru adalah ujung tombak pendidikan, tapi tidak semua siswa beruntung mendapat pengajar yang berkualitas.

- **Apa yang Terjadi?**

Di daerah-daerah terpencil, masih banyak guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan atau belum mendapatkan pelatihan yang memadai. Beberapa dari mereka bahkan merangkap mengajar beberapa mata pelajaran karena kekurangan tenaga.

- **Mengapa Ini Penting?**

Ketika guru tidak memiliki cukup pengetahuan atau keterampilan mengajar, proses belajar di kelas jadi kurang efektif. Siswa kesulitan memahami materi, dan ini berdampak langsung pada prestasi belajar mereka. Bahkan,

kurangnya motivasi dari guru bisa ikut memengaruhi semangat belajar siswa.

c. Tekanan Ekonomi dan Pengaruh Budaya.

Faktor ekonomi dan nilai-nilai budaya juga memainkan peran besar dalam akses anak terhadap pendidikan.

- **Apa yang Terjadi?**

Banyak keluarga, khususnya di pedesaan, menghadapi tekanan ekonomi. Anak-anak mereka kadang harus ikut bekerja untuk membantu keluarga. Di beberapa daerah, budaya yang masih memordukan pendidikan, terutama bagi anak perempuan, juga menjadi penghalang.

- **Mengapa Ini Penting?**

Jika anak-anak harus bekerja atau tidak diizinkan sekolah karena norma budaya, mereka kehilangan kesempatan membangun masa depan yang lebih baik. Hal ini juga memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat.

d. Sulitnya Akses Transportasi.

Jarak yang jauh dan minimnya fasilitas transportasi juga menjadi penghambat besar bagi anak-anak untuk bersekolah.

- **Apa yang Terjadi?**

Bayangkan anak-anak

yang harus berjalan kaki berjam-jam setiap hari, melewati jalan berlumpur, menyeberangi sungai, atau mendaki bukit demi sampai ke sekolah. Ini adalah kenyataan yang masih dihadapi banyak anak di wilayah terpencil Indonesia.

- **Mengapa Ini Penting?**

Perjalanan panjang dan melelahkan bisa membuat anak-anak kelelahan sebelum belajar. Bahkan, dalam kondisi cuaca buruk atau ancaman keamanan, banyak dari mereka akhirnya memilih untuk tidak berangkat sekolah.

e. Stigma dan Diskriminasi.

Masih ada anak-anak yang terpinggirkan karena latar belakang mereka.

- **Apa yang Terjadi?**

Anak-anak dari kelompok minoritas, difabel, atau yang memiliki kebutuhan khusus kadang mendapatkan perlakuan berbeda, baik dari teman sekelas, guru, maupun lingkungan sekitar. Mereka bisa mengalami ejekan, pengucilan, atau bahkan tidak diterima di sekolah.

- **Mengapa Ini Penting?**

Lingkungan sekolah yang tidak inklusif membuat anak-anak merasa tidak aman dan tidak nyaman. Ini bukan hanya berdampak

pada semangat belajar, tapi juga bisa merusak kepercayaan diri dan perkembangan sosial mereka.

3. Rekomendasi Kebijakan: Langkah Menuju Akses Pendidikan yang Lebih Merata dan Berkualitas.

Berdasarkan berbagai tantangan yang telah diidentifikasi sebelumnya, ada sejumlah langkah konkret yang bisa diambil untuk memperkuat sistem pendidikan dasar di Indonesia. Rekomendasi berikut dirancang agar setiap anak, tanpa terkecuali, dapat menikmati pendidikan yang layak dan bermakna.

a. Perkuat Infrastruktur Pendidikan

- **Bangun dan Perbaiki Sekolah**

Pemerintah perlu terus mendorong pembangunan sekolah baru, khususnya di daerah-daerah yang selama ini masih kesulitan akses. Sekolah yang sudah ada juga perlu diperbaiki agar aman, nyaman, dan layak digunakan, lengkap dengan toilet, air bersih, dan ruang belajar yang memadai.

- **Rawat yang Sudah Ada**

Tak cukup hanya membangun pemeliharaan juga penting. Pemerintah bisa bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk melakukan perawatan

sekolah secara berkala, agar gedung sekolah tetap berfungsi dengan baik dan tidak cepat rusak.

- **Gunakan Teknologi sebagai Solusi**

Teknologi bisa jadi jembatan penghubung untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau secara fisik. Misalnya, melalui pembelajaran daring, platform belajar digital, atau kelas hibrida yang memungkinkan siswa tetap mendapatkan pendidikan meski tidak bisa hadir secara langsung.

- b. **Dukung dan Kembangkan Guru.**

- **Latih Guru Secara Berkelanjutan**

Guru yang hebat adalah kunci dari pendidikan yang baik. Pemerintah perlu menyediakan pelatihan rutin bagi guru, terutama yang mengajar di daerah pelosok. Pelatihan ini bisa mencakup metode belajar kreatif, pemanfaatan teknologi, dan pendekatan untuk anak berkebutuhan khusus.

- **Berikan Insentif untuk Guru di Daerah Terpencil**

Supaya lebih banyak guru berkualitas mau mengajar di wilayah terpencil, mereka perlu didukung dengan insentif seperti tunjangan khusus, tempat

tinggal yang layak, atau program penghargaan.

- **Mentoring Antar Guru**

Membangun sistem mentoring antara guru berpengalaman dan guru baru atau yang berada di daerah terpencil bisa sangat membantu. Dengan saling berbagi pengalaman dan solusi, kualitas pengajaran bisa meningkat secara merata.

- c. **Ringankan Beban Ekonomi Keluarga.**

- **Beasiswa Lebih Luas, Lebih Merata**

Anak-anak dari keluarga kurang mampu sangat membutuhkan dukungan biaya pendidikan. Pemerintah bisa memperluas cakupan beasiswa tidak hanya untuk biaya sekolah, tapi juga buku, seragam, dan kebutuhan penunjang lainnya.

- **Bantu Ekonomi Keluarga**

Selain untuk siswa, dukungan juga perlu diberikan kepada keluarga. Program bantuan tunai atau pelatihan keterampilan bagi orang tua bisa membantu mereka lebih mandiri, sehingga anak-anak tidak harus ikut bekerja dan bisa fokus belajar.

- **Ubah Pola Pikir Lewat Edukasi Publik**

Perlu kampanye yang masif dan konsisten tentang pentingnya pendidikan, terutama bagi anak perempuan dan kelompok marginal. Edukasi ini penting agar masyarakat bisa mulai meninggalkan norma-norma lama yang justru membatasi masa depan anak-anak mereka.

d. Permudah Akses Transportasi.

• **Bangun Jalan dan Transportasi Umum**

Jalan yang layak dan transportasi umum yang aman sangat krusial, terutama untuk anak-anak yang harus menempuh jarak jauh ke sekolah. Pemerintah bisa memprioritaskan pembangunan infrastruktur ini di daerah yang paling membutuhkan.

• **Sediakan Transportasi Sekolah**

Program bus sekolah atau kendaraan antar-jemput bisa sangat membantu anak-anak di pelosok. Ini bukan hanya soal kemudahan, tapi juga soal keamanan dan semangat mereka untuk tetap bersekolah.

• **Edukasi tentang Keselamatan**

Orang tua dan siswa juga perlu diberikan edukasi

tentang cara aman bepergian ke sekolah, terutama di daerah rawan atau yang jalannya belum layak.

e. Wujudkan Pendidikan yang Inklusif.

• **Latih Guru agar Siap Mengajar Semua Anak**

Tidak semua guru paham bagaimana menghadapi siswa dengan kebutuhan khusus. Maka itu, pelatihan tentang pendidikan inklusif harus jadi prioritas, supaya setiap anak merasa diterima dan bisa berkembang maksimal di kelas.

• **Pastikan Sekolah Ramah Disabilitas**

Fasilitas di sekolah juga perlu menyesuaikan mulai dari jalur kursi roda, toilet khusus, hingga alat bantu belajar. Ini bukan hanya soal akses fisik, tapi juga soal rasa dihargai dan diperlakukan setara.

• **Hilangkan Stigma Lewat Sosialisasi**

Masyarakat perlu terus diedukasi tentang pentingnya pendidikan untuk semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Semakin besar pemahaman, semakin kecil peluang terjadinya diskriminasi.

D. Kesimpulan

Akses pendidikan dasar di Indonesia bukan sekadar soal bangku sekolah dan buku pelajaran ia adalah persoalan kompleks yang menyentuh banyak sisi kehidupan, mulai dari kebijakan hingga kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Pemerintah memang telah melakukan berbagai upaya, seperti Program Wajib Belajar, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan pembangunan infrastruktur. Namun, di lapangan, masih banyak tantangan nyata yang harus dihadapi.

Masalah-masalah seperti ketimpangan infrastruktur antarwilayah, kualitas guru yang belum merata, tekanan ekonomi yang membuat anak-anak harus membantu keluarga, norma budaya yang menghambat partisipasi anak perempuan, serta hambatan transportasi dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu semua ini masih menjadi penghalang besar bagi anak-anak untuk bisa mengenyam pendidikan secara layak.

Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah yang menyeluruh dan saling terhubung. Rekomendasi seperti memperkuat infrastruktur sekolah, meningkatkan pelatihan dan kesejahteraan guru, memberikan beasiswa serta bantuan ekonomi kepada keluarga, memperbaiki akses transportasi, dan menerapkan pendidikan yang benar-benar inklusif, adalah bagian penting dari solusi yang harus dijalankan secara konsisten.

Dengan komitmen dan kerja bersama, kita bisa menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan berkualitas. Pendidikan dasar bukan hanya hak, tapi juga fondasi utama bagi masa depan anak-anak Indonesia. Memberikan akses yang sama kepada setiap anak adalah investasi jangka panjang yang akan menentukan arah bangsa ini ke depan. Sebab pada akhirnya, anak-anak yang berpendidikan hari ini adalah para pemimpin, inovator, dan penentu masa depan kita esok hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas. (2006). *Pedoman Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Laporan Tahunan Pendidikan Indonesia 2020*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mulyasa, E. (2013). *Manajemen Pendidikan: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prasetyo, Z. (2019). *Pendidikan Inklusif: Konsep dan Implementasi di Sekolah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Supriyadi, A. (2017). *Pendidikan Dasar di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

- UNESCO. (2015). *Education for All 2015 National Review: Indonesia*. Jakarta: *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*.
- Nurdin, M. (2018). "Analisis Kebijakan Pendidikan Dasar di Indonesia: Tantangan dan Peluang". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 3(1), 45-60.
- Rahman, A. (2021). "Kualitas Guru dan Dampaknya terhadap Akses Pendidikan di Daerah Terpencil". *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 27(2), 123-135.
- Sari, D. (2020). "Faktor Ekonomi dan Budaya dalam Akses Pendidikan Dasar di Indonesia". *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3), 201-215.
- Wibowo, A. (2016). "Kendala Transportasi dalam Akses Pendidikan di Wilayah Terpencil". *Jurnal Transportasi dan Pendidikan*, 4(1), 67-78.
- Yulianti, R. (2019). "Stigma dan Diskriminasi dalam Pendidikan: Tantangan bagi Anak-Anak dengan Kebutuhan Khusus". *Jurnal Pendidikan Inklusi*, 2(1), 15-30.